



# ACEH INSIGHT

Volume 1, Edisi 3

Januari 2011

Laporan Utama : 1  
Aceh Siapkan  
Kebijakan Ten-  
tang PES

Pilot Percontohan 2  
PES di DAS  
Krueng Peusangan

Mengapa DAS 4  
Peusangan  
Penting?

Belajar PES ke 5  
Cidanau

Membangun Fo- 6  
rum DAS dari  
Krueng Sabee  
Hingga Peusangan

Mendorong Inves- 7  
tasi Hijau di Aceh

Green School 8



Konsultasi publik membahas Rancangan Qanun Pengelolaan Jasa Lingkungan di Hotel Hermes Palace Banda Aceh 9 Desember 2010 (Foto: UNESCAP)

## Aceh Siapkan Kebijakan Tentang PES

**ACEH** adalah sedikit dari beberapa daerah di Indonesia yang saat ini menyusun kebijakan tentang PES (*Payment for Environmental Services*) atau Imbal Jasa Lingkungan dalam upaya membiayai pelestarian lingkungan.

Sejak September 2008, Badan PBB Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) bersama mitra utamanya WWF-Indonesia Kantor Program Aceh dan Badan Pengelola Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh melaksanakan Program Pengembangan Kebijakan dan Percontohan untuk Imbal Jasa Lingkungan di Aceh (*Project on Policy and Pilots Payment for Environmental Services in Aceh/3PESA*).

Kegiatan utama 3PESA adalah mendorong kebijakan dan peraturan tentang PES serta menyiapkan dua pilot

percontohan PES di Aceh yakni di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Montala, Jantho, Kabupaten Aceh Besar dan di DAS Krueng Peusangan yang berlokasi di Kabupaten Bireun.

Pilot PES di Krueng Montala telah dilaksanakan sejak pertengahan Desember 2010 yang dilakukan antara Forum Masyarakat Peduli Krueng Montala dan Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Montala dengan difasilitasi UNESCAP.

Sementara pilot percontohan PES di DAS Krueng Peusangan sedang tahap persiapan antara Aliansi Masyarakat Peduli DAS dengan dua perusahaan yakni PT. Arun dan PT.PIM yang difasilitasi oleh WWF.

Kebijakan PES disusun dalam bentuk Naskah Akademik dan Rancangan Qanun tentang Pengelolaan

Jasa Lingkungan. Tim penyusunan kebijakan PES dipimpin oleh Ketua Task Force PES Kepala Bapedal Aceh Husaini Syamaun. Penyusunan dokumen melibatkan para ahli hukum dan lingkungan.

Proses ini telah berjalan sejak awal tahun 2010 melalui beberapa tahapan diskusi publik diantaranya fokus grup yang melibatkan pihak pemerintahan, akademisi, kelompok swadaya masyarakat, tokoh masyarakat adat serta privat sektor yang bersinggungan dalam pemanfaatan jasa ekosistem.

Awal Desember lalu telah dilaksanakan konsultasi publik di Hotel Hermes Palace Banda Aceh untuk menjangkau masukan akhir sebelum rancangan qanun ini dikonsultasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan kemudian

## Aceh Siapkan .....

diserahkan kepada Pemerintah Aceh untuk diteruskan upaya legilasinya ke parlemen.

Rancangan qanun tentang Penge-lolaan Jasa Lingkungan diharapkan menjadi payung hukum dalam penerapan skema PES di Aceh. Peraturan ini nantinya akan mengatur kegiatan-kegiatan pembiayaan pelestarian jasa lingkungan di Aceh melalui kerjasama yang bersifat sukarela antara penyedia jasa lingkungan (*provider*) dan pengguna jasa lingkungan (*user*).

Dana yang didapat dari kompensasi jasa lingkungan dipergunakan untuk konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Ada 4 kategori jasa lingkungan yang dapat dimasukkan dalam skema PES di Aceh berdasarkan sumber yang dapat dimanfaatkan yaitu jasa tata air, jasa keanekaragaman hayati, jasa keindahan lanskap (wisata) dan jasa penyerapan karbon. Dua pilot percontohan PES di Aceh akan fokus pada jasa air.

Skema PES menjadi model menarik untuk mengembangkan kebijakan dan mekanisme pendanaan lestari untuk perlindungan lingkungan yang melibatkan pemerintah, privat sektor dan masyarakat luas yang bersinggungan dengan jasa ekosistem setempat. Untuk implementasinya akan dibentuk sebuah lembaga independen yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, wakil masyarakat, akademisi, LSM, dan pemanfaat jasa (privat sektor).

*chik rini*

## Pilot Percontohan PES di DAS Krueng Peusangan

**KECAMATAN** Peusangan Selatan dan Kecamatan Juli di Kabupaten Bireun menjadi lokasi pilihan untuk pilot percontohan penerapan mekanisme PES (*Payment for Environmental Services*) atau imbal jasa lingkungan yang diinisiasi oleh WWF-Indonesia Kantor Program Aceh.

Ini adalah dua kecamatan yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS)

Krueng Peusangan yang menjadi fokus kegiatan perlindungan daerah tangkapan air di Aceh.

WWF bekerjasama dengan sebuah lembaga lokal di Bireun yakni Aceh Green Care telah memfasilitasi pembentukan Forum DAS di tingkat lokal yang diberi nama Aliansi Masyarakat Peduli DAS. Aliansi ini adalah per-

wakilan kelompok tani dari 8 desa di dua kecamatan tersebut. Selama ini Aceh Green Care telah melakukan pembinaan kelompok tani di Juli untuk mengembangkan pertanian organik.

Desa-desa yang menjadi pilihan untuk lokasi pilot percontohan PES ini kebanyakan berada di sepanjang sisi Sungai Krueng Peusangan. Di sini banyak aktivitas galian C untuk mengambil batu dan pasir yang dilakukan oleh masyarakat. Pengerukan pasir dan batu yang tak terkendali menyebabkan abrasi dan erosi di tebing sungai. Kualitas air menjadi semakin buruk. Selain itu di wilayah ini banyak terdapat lahan kritis yang harus direstorasi.

Di Kecamatan Peusangan Selatan, terdapat water intake (tempat pengambilan air) dua pabrik besar di Lhokseumawe yakni PT Arun dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Selain itu ada juga water intake milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bireun dan PDAM Tirta Pase Aceh Utara.

Januari 2011, PT. Arun sebagai pihak buyer yang selama ini memanfaatkan air dari Krueng Peusangan untuk kegiatan industrinya, akan melaksanakan ker-



Kawasan water intake PT Arun yang akan menjadi lokasi pilot PES di DAS Peusangan (Foto : Mahmud Yani/WWF-Indonesia)

## Pilot Percontohan...

jasama PES pertama di DAS Krueng Peusangan. PT Arun akan memberikan kompensasi melalui Aliansi Masyarakat Peduli DAS untuk kegiatan perlindungan daerah tangkapan air. PT Arun setuju untuk membiayai restorasi lahan kritis di sekitar water intake perusahaan itu di Kecamatan Peusangan Selatan.

Selain itu PT. PIM juga mempunyai minat serupa untuk membiayai restorasi lahan kritis di Kecamatan Juli. Negosiasi dengan PT. PIM sedang dalam proses. Pembayar jasa potensial lainnya yang berminat melaksanakan PES di DAS Krueng Peusangan adalah PDAM Tirta Pase Aceh Utara dan PDAM Bireuen.

Dalam rencana kerjasama PES di DAS Krueng Peusangan ini, PT Arun berkomitmen memberikan bibit pohon dan biaya perawatan kepada Aliansi Masyarakat Peduli DAS. Bibit pohon yang akan diberikan berupa tanaman buah-buahan dan tanaman kehutanan dengan perbandingan 70 : 30 persen.

Tanaman buah-buahan akan ditanam di lahan kritis milik masyarakat di sepanjang sungai diselingi dengan tanaman kehutanan dan tanaman penguat tebing sungai untuk mencegah abrasi. Diharapkan masyarakat akan mendapat nilai ekonomi tambahan dari menanam pohon buah-buahan.

Dari survei yang telah dilakukan terdapat 2000 hektar lahan kritis yang ada di sepanjang sisi Krueng Peusangan antara Kecamatan Peusangan Selatan hingga ke Kecamatan Juli. Untuk tahap pertama ini, PT Arun berkomitmen untuk merestorasi 200 hektar lahan kritis di sekitar water intake miliknya.

DAS Krueng Peusangan menjadi sumber air bagi kehidupan 1 juta orang yang tinggal di 5 kabupaten/kota yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun, Aceh Utara dan Lhokseumawe. Air dari DAS Krueng Peusangan digunakan untuk



Pembahasan kerjasama PES dengan Private Sektor di Bireun (Foto : WWF-Indonesia)

keperluan hidup, kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan serta untuk kegiatan industri-industri besar.

Pelaksanaan skema PES di DAS Krueng Peusangan akan menjadi salah satu upaya strategis untuk perlindungan dan pengelolaan DAS Krueng Peusangan secara terpadu dan berkelanjutan. Konteks PES di DAS Krueng Peusangan adalah perlindungan jasa air.

Beberapa kajian telah dilakukan WWF dan mitra kerjanya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan di DAS Krueng Peusangan. Seperti kajian hidrologi oleh ICRAF, kajian sosial ekonomi oleh LP3ES serta kajian penyedia jasa dan pembayar jasa (*seller-buyer*) oleh tim WWF.

Dari diskusi dengan para pihak didapatkan bahwa skema PES yang cocok diterapkan di DAS Krueng Peusangan adalah pembayaran tidak langsung. Mekanisme kerjasama antara *seller* dan *buyer* akan melibatkan lembaga perantara.

Hasil negosiasi dan kesepakatan kerjasama akan dituangkan dalam

perjanjian kerjasama antara lembaga perantara dengan *buyer* dan antara lembaga perantara dengan *seller*. Di Bireun yang menjadi lembaga perantaranya adalah Aliansi Masyarakat Peduli DAS. Kerjasama yang akan dilaksanakan bersifat sukarela dan saling menguntungkan.

Pembayar jasa akan memperoleh keuntungan dengan mendapatkan jaminan tersedianya sumber air yang lebih baik kualitas dan kuantitasnya karena telah membiayai upaya restorasi daerah tangkapan air. Sementara si penyedia jasa akan mendapatkan keuntungan karena mendapatkan kompensasi dana untuk kegiatan restorasi, memperoleh bibit tanaman bernilai ekonomi seperti buah-buahan, serta mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan.

**Yoesman Nurzaman Tanjung**

## MENGAPA DAS PEUSANGAN PENTING?



Hulu utama DAS Peusangan di Danau Laut Tawar, Kota Takengon.  
(Foto : Mahmud Yani/WWF-Indonesia)

**PEUSANGAN** adalah nama daerah tangkapan air terpenting di Aceh, yang melintasi 5 kabupaten/kota yakni Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun, Aceh Utara dan kota Lhoksuemawe.

Di DAS ini terdapat sebuah sungai utama yang sangat penting keberadaannya bagi kehidupan banyak orang yakni Peusangan. Di bagian hulu, orang suku Gayo menyebutnya Wih Peusangan. Sedang di bagian hilir, dimana banyak tinggal suku Aceh, sungai ini disebut Krueng Peusangan.

Panjang Krueng Peusangan sampai 128 KM. Hulu utamanya ada di Danau Laut Tawar yang berada di dataran tinggi kota Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah.

Selain itu ada 107 sungai lainnya yang berasal dari hutan-hutan di sekitar Bukit Barisan turut mengalirkan airnya ke Krueng Peusangan. Total panjang sungai-sungai ini mencapai 6.469 KM.

Potensi airnya mencapai 16 milyar meter kubik per tahun sehingga berpeluang untuk dimanfaatkan

untuk pembangkit listrik tenaga air. Air Krueng Pesangan berakhir di laut Selat Malaka di Kabupaten Bireun.

Bentang lahan yang menjadi daerah tangkapan air Krueng Peusangan disebut Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan. Luas DASnya mencapai 238.550 hektar.

DAS Krueng Peusangan terdiri dari 12 sub DAS yakni Krueng Peusangan Hilir, Ulee Gle, Teupin Mane, Krueng Keueh, Krueng Simpo, Wih Genengan, Timang Gajah, Wih Bruksah, Bawang Gajah, Wih Balek, Krueng Ceulala dan Laut Tawar.

DAS Krueng Peusangan masuk dalam kategori kritis 1 nasional yang harus segera diselamatkan dari kerusakan. Hutan-hutan yang menjadi daerah tangkapan air telah mengalami degradasi akibat konversi lahan. Selain itu ada ancaman lainnya oleh galian C yang mengakibatkan erosi di tebing sungai.

Debit air sungai berkurang di musim kering, namun dengan cepat menjadi sumber banjir di musim hujan.

Krueng Peusangan berperan penting sebagai sumber air bagi kehidupan 1 juta orang. Masyarakat menggunakannya untuk kepentingan pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber air untuk kehidupan sehari-hari.

Selain itu kegiatan industri besar seperti PT Arun (pengolahan gas), PT PIM (pupuk) juga sangat tergantung pada sumber air dari Krueng Peusangan. Begitu pentingnya keberadaan Krueng Peusangan sehingga kerusakan ekosistem di sekitarnya dapat berakibat besar pada kehidupan banyak orang.

Selama kurun waktu 20 tahun Krueng Peusangan mengalami masalah akibat semakin hancurnya ekosistem di sekitar DAS. Dari citra satelit terlihat terjadi pengurangan 40 persen luas tutupan selama tahun 1990-2009.

**Bersambung ke halaman 5**

## Mengapa DAS....

Kawasan hutan dengan cepat beralih fungsi menjadi perkebunan kopi, kelapa sawit, kakao, pinang dan kebun campuran lainnya. Belum lagi masalah kebakaran hutan pinus terutama di sekitar Danau Laut Tawar yang memperparah kehancuran hutan yang menjadi daerah tangkapan air.

Danau Laut Tawar saat ini mengalami pengurangan debit air akibat pendangkalan karena sedimentasi yang disebabkan oleh erosi tanah maupun aktivitas masyarakat yang membuang sampah organik ke danau. Diperkirakan selama kurun 30 tahun terakhir permukaan Danau Laut Tawar turun mencapai 1 meter.

Sementara masyarakat yang tinggal di bagian tengah dan hilir Krueng Peusangan kerap menghadapi masalah banjir, abrasi dan erosi yang mengakibatkan kerugian ekonomi. DAS Peusangan juga menghadapi masalah karena kegiatan pertambangan terutama galian C.

DAS Krueng Peusangan masuk dalam kategori kritis 1 nasional yang harus segera diselamatkan dari kerusakan. Diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang terpadu antara hulu dan hilir. Pemerintah 5 kabupaten/kota di DAS Peusangan telah sepakat untuk menjalin kerjasama untuk pengelolaan DAS secara bersama dan berkelanjutan.

Upaya yang harus dilakukan antara lain pengembangan ekonomi masyarakat di bagian hulu, konservasi kawasan tangkapan air, melakukan mitigasi bencana dan mengembangkan skema PES atau jasa lingkungan di kawasan DAS Peusangan.

Keberadaan PES bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien dan bertanggung jawab, sehingga mengurangi ancaman kerusakan lingkungan yang lebih parah.

- **Tim WWF-Indonesia  
Kantor Program Aceh**

## Belajar PES ke Cidanau



Tim dari Aceh meninjau kawasan restorasi di hulu DAS Cidanau dan bertemu dengan Forum Komunika DAS Cidanau (Foto : Yoesman Nurzaman Tanjung/WWF-Indonesia)

**Awal** Desember 2010, WWF beserta Pemerintah Kabupaten Bireun, PDAM dan PT PIM melakukan studi banding ke DAS Cidanau di Provinsi Banten untuk melihat pengelolaan DAS yang melibatkan para pihak di sana.

Selain itu tim juga melihat penerapan skema PES dimana PT. Krakatau Tirta Industri (KTI), anak perusahaan dari PT. Krakatau Steel, yang mengolah air bersih dari DAS Cidanau melakukan kontrak kerjasama dengan masyarakat yang tinggal di hulu DAS Cidanau untuk melesta-

rikan dan memulihkan kawasan tangkapan air di sana.

DAS Cidanau terletak di antara Kabupaten Serang dan Pandeglang dekat kota Cilegon dimana banyak terdapat kegiatan industri. Status Cidanau adalah Cagar Alam Rawa Danau, yakni satu-satunya rawa penunungan di Pulau Jawa. DAS ini menjadi sumber air bagi kehidupan masyarakat sekitarnya serta untuk kebutuhan 120 industri besar dan kecil yang ada di sana.

DAS Cidanau juga mengalami masalah akibat meningkatnya luas lahan

kritis dan tingginya sedimentasi yang mengurangi kualitas air. Untuk mengintegrasikan upaya pelestarian DAS Cidanau dibentuklah Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) yang melibatkan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan DAS Cidanau.

Masyarakat dilibatkan dalam berbagai upaya penanganan kerusakan hutan dan lahan yang diawali dengan musyawarah warga di setiap kecamatan di wilayah DAS Cidanau.

**Bersambung ke halaman 6**

## Belajar PES...

FKDC adalah lembaga independen yang di-SK-kan oleh Gubernur Banten. FKDC menjadi lembaga perantara dalam pelaksanaan skema PES di Cidanau. PT KTI sejak beberapa tahun lalu secara sukarela memberikan dana kompensasi bagi perlindungan hulu DAS Cidanau. Setiap tahun perusahaan ini memberikan dana melalui FKDC sebesar Rp 250 juta untuk mengelola areal seluas 100 hektar dengan kontrak selama 5 tahun.

FKDC menyalurkan dana itu kepada 4 kelompok tani untuk kegiatan restorasi dan perlindungan kawasan tangkapan air. Petani dibayar berdasarkan jumlah pohon yang ada di lahannya.

Kompensasi diberikan sebagai ganti hak untuk tidak menebang pohon. Dana digunakan untuk kegiatan penanaman pohon yang jenisnya dapat ditentukan sendiri oleh para petani.

Setelah berjalan 5 tahun kegiatan skema PES di Cidanau lumayan berhasil untuk meningkatkan pelestarian daerah tangkapan air di sana. Skema PES di Cidanau menjadi contoh menarik untuk ditiru oleh banyak daerah di Indonesia. Belum lama ini FKDC mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah atas upaya-upayanya melestarikan DAS Cidanau.

Selama kunjungan ke Cidanau

tim dari Aceh berdiskusi dan mendapat banyak informasi bagaimana kegiatan FKDC dalam mengelola DAS Cidanau, bertemu dengan PT KTI dan meninjau kegiatan kelompok tani dalam kegiatan pelestarian hulu Cidanau. Hasil kunjungan ini diharapkan menjadi pembelajaran bagaimana Skema PES dapat diterapkan juga dalam upaya pelestarian DAS Krueng Peusangan.

*Yoesman Nurzaman Tanjung*

## Membangun Forum DAS Dari Krueng Sabee Hingga Krueng Peusangan

**WWF-Indonesia** punya pengalaman menarik bagaimana membangun Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh yang diinisiasi dari dua level yang berbeda, yakni Forum DAS yang dibangun dari inisiasi masyarakat di tingkat bawah dan Forum DAS yang dibangun dari tingkat atas pengambil kebijakan di pemerintahan lintas kabupaten/kota di Aceh.

Forum DAS Krueng Sabee adalah contoh Forum DAS yang dibangun atas inisiasi langsung dari masyarakat lokal. Forum ini dibangun dari keinginan kuat masyarakat 10 desa yang ada di sepanjang Sungai Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, sebuah sungai cukup besar di wilayah barat Aceh.

WWF bersama Yayasan Pemerhati Dunia Hijau Indonesia (PADHI) dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan didukung oleh American Red Cross telah membantu memfasilitasi masyarakat untuk membentuk Forum DAS Krueng Sabee. Masyarakat merancang sendiri kelembagaan Forum DAS Krueng Sabee melalui musyawarah partisipatif.

Forum ini terbentuk secara resmi pertengahan 2008. Anggota Forum terdiri dari unsur masyarakat desa, tokoh adat dan pemerintahan Aceh Jaya. Ketua forumnya adalah Abdullah Rajab seorang tokoh adat di sana.

Forum ini kemudian mendapat

pengakuan dari Pemerintahan kabupaten Aceh Jaya dan telah disahkan kelembagaannya melalui Surat Keputusan Bupati.

Hingga saat ini keberadaan Forum DAS Krueng Sabee berdampak positif pada upaya mengurangi kerusakan lingkungan lebih parah terutama di bagian hulu sungai. Anggota Forum DAS aktif menyadarkan masyarakat untuk ikut serta melindungi hutan, termasuk memberi penyadaran kepada pelaku illegal logging agar tidak menebang pohon.

Kegiatan utama Forum DAS Krueng Sabee dalam waktu dekat ini adalah membuat kawasan restorasi seluas 180 hektar di bagian hulu DAS. Kawasan ini akan ditanami oleh tanaman kehutanan dan buah-buahan. Masyarakat akan membangun sendiri pusat pembibitannya. Forum DAS Krueng Sabee juga sudah membuat MoU dengan Badan Layanan Air Minum Daerah Aceh Jaya untuk menjalankan mekanisme Imbal Jasa Lingkungan dalam upaya melindungi DAS Krueng Sabee.

Sementara itu proses inisiasi Forum DAS dari level atas dilakukan untuk DAS Krueng Peusangan. Prosesnya lebih agak rumit daripada di Krueng Sabee, karena DAS Krueng Peusangan berada di lintas 5 kabupaten/kota

yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun, Aceh Utara dan Lhokseumawe. Untuk menyatukan pemikiran para pihak di sana memerlukan proses lobi dan diskusi karena nantinya menyangkut menyatukan dan meningkatkan koordinasi program dari para pihak terutama dari pemerintah.

Proses mendorong pengelolaan DAS Krueng Peusangan secara bersama antara para pihak di 5 kabupaten/kota telah berlangsung sejak 2008. Hasil yang dicapai antara lainnya para 5 Bupati/Walikota sepakat untuk mengelola DAS Krueng Peusangan secara bersama dan berkelanjutan. Dalam waktu dekat MoU kerjasama lintas kabupaten/kota akan ditandatangani para pejabat tersebut. Sebuah rencana strategis pengelolaan DAS Krueng Peusangan telah disusun bersama oleh para pihak.

Untuk memperkuat pengelolaan DAS Krueng Peusangan, telah dibentuk Forum DAS Krueng Peusangan yang mendapat dukungan penuh dari BP DAS Krueng Aceh. Desember 2010 Forum DAS Krueng Peusangan terbentuk di Banda Aceh. Anggotanya adalah para pihak dari 5 kabupaten/kota. Ketua Forum DAS adalah Dede Suhendra. Forum DAS ini akan disahkan kelembagaannya oleh keputusan Gubernur Aceh.

- *Chik Rini*

## Mendorong Investasi Hijau di Aceh

**MENINDAKLANJUTI** Program Green Coastal untuk restorasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir barat Aceh yang ter kena imbas bencana tsunami, sejak tahun 2009 WWF-Indonesia Kantor Program Aceh melaksanakan program investasi hijau di bidang perikanan atau Green Investment for Fisheries.

Ini merupakan program mendorong strategi investasi terhadap usaha perikanan tangkap maupun budidaya perikanan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan yang tidak saja memberikan manfaat ekonomi yang maksimum namun juga manfaat sosial ekologi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dapat diartikan sebagai investasi yang mendukung Environmental Stewardship (penjagaan lingkungan), perlindungan konsumen, keanekaragaman hayati dan keadilan.

Aceh mempunyai potensi kelautan dan perikanan lumayan besar untuk dikelola. Panjang garis pantai Aceh mencapai 1.660 kilometer dengan luas perairan laut mencapai 295.370 km yang terdiri dari perairan teritorial dan perairan kepulauan seluas 56.563 km<sup>2</sup> dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 238.807 km<sup>2</sup>.

Kekayaan laut mencakup keanekaragaman hayati, keindahan wilayah pesisir, potensi perikanan dan lain sebagainya. Sayangnya potensi tersebut sampai saat ini belum dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip keberkelanjutan.

Ini bisa dilihat dari berbagai kerusakan yang terus terjadi pada potensi kelautan dan perikanan, dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan. Salah satu aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan tersebut adalah investasi ekonomi dalam berbagai bentuk yang ditujukan untuk kepentingan mencari keuntungan secara besar-besaran.

Pemerintah Aceh saat ini sedang mengembangkan strategi pembangunan ekonomi dan investasi hijau atau dikenal dengan *Green Aceh*. Pasca tsunami banyak investor masuk ke Aceh untuk menanamkan modalnya.



Konsultasi Publik Panduan Investasi Hijau di Hotel Oasis Juni 2009

Selain bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun disisi lain dapat meningkatkan ancaman terhadap kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Apabila investasi tidak mengindahkan faktor ekologis tentu tidak sejalan dengan komitmen Pemerintah Aceh yang visinya *Green Aceh*.

Pada awal 2010 WWF mampu blikasikan Panduan Umum Investasi Hijau Bidang Perikanan Untuk Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Aceh kepada pemerintah NAD, perbankan, *private sector* (investor), institusi, perwakilan masyarakat adat Aceh, dan organisasi non-pemerintah.

Panduan ini disusun oleh ahli perikanan dari Institut Pertanian Bogor. Saat ini WWF melakukan kerjasama menyiapkan skema Investasi Hijau pada level provinsi, kabupaten dan privat sektor.

Di tingkat provinsi, WWF bekerjasama dengan Badan Investasi dan Promosi Aceh menyusun peraturan gubernur yang mengimplementasikan prinsip dan tahapan investasi hijau sebagai aturan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 5/2009 tentang

Penanaman Modal. Saat ini sudah dilakukan proses konsultasi publik, dan selanjutnya akan proses pengesahan oleh gubernur.

Sementara di Kabupaten Aceh Besar, WWF, KuALA dan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten itu sedang menyiapkan sebuah peraturan bupati untuk investasi hijau di bidang perikanan. Aceh Besar dipilih karena mempunyai potensi kelautan yang lumayan besar di Aceh.

WWF juga bekerjasama dengan perbankan di Aceh menyusun Panduan Umum Sreening Investment untuk Perbankan di bidang perikanan dan perkebunan. Panduan ini dirancang sebagai pedoman untuk menyaring proses pemberian pinjaman kepada calon investor yang akan menanamkan modalnya di Aceh.

Beberapa Bank seperti BNI, BRI, Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim telah setuju menerapkan prinsip-prinsip investasi hijau dalam proses peminjaman modal kepada nasabahnya.

- *Dewi Nopita Sari*



## Green School

Tahun 2009-2010 WWF-Indonesia Kantor Program Aceh melaksanakan program Green School atau Sekolah Hijau bersama 7 Sekolah Dasar yang ada di Banda Aceh yakni SD 24 Lampineung, SD 25 Lampriet, SD 54 Peurada, SD 20 Kp. Keuramat, SD Kartika, dan SD 32 Beurawe.

Program ini merupakan rangkaian sosialisasi di sekolah-sekolah tentang pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Tim WWF berkunjung ke sekolah dan mengisi kegiatan ekstra kurikuler siswa.

Kegiatan diisi dengan presentasi interaktif tentang hutan, laut, satwa dan ancaman-ancaman kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, serta kekeringan. Siswa juga diajak untuk berdiskusi dan bertukar pikiran tentang hal-hal yang menarik bagi mereka. Ada banyak permainan seperti menyusun puzzle, tebak gambar dan quis yang disukai siswa.

### Tim Redaksi

**Penanggung Jawab :**  
Dede Suhendra

**Editor :**  
Chik Rini

**Kontributor :**  
Azhar  
Yoesman N Tanjung  
Dewi Nopita Sari  
Mahmud Yani  
Cut Desyana

**Administrasi :**  
Sukriadi  
Ernawati

**Sirkulasi :**  
Syarifuddin  
Sofyan  
Zulfeni

### Alamat Redaksi :

WWF-Indonesia  
Kantor Program Aceh  
Jalan Teungku HM Daud  
Beureueh No. 177A  
Lampriet, Banda Aceh

Redaksi menerima saran, kritik dan sumbangan tulisan/foto terkait isu-isu lingkungan di Aceh, yang dialamatkan ke email :  
[crini@wwf.or.id](mailto:crini@wwf.or.id)

Kunjungi juga wesite :

[www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id)

